Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau

Optimazing Disaster Communication in Reducing Haze in Riau Province

Rohayati¹⁾* & Nur Alhidayatillah²⁾

1) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, Indonesia

2) Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, Indonesia

Diterima: 09 September 2019; Disetujui: 18 April 2020; Dipublish: 27 April 2020
Corresponding email: * rohayati@uin-suska.ac.id, /** Nuralhidayatillah@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi optimalisasi komunikasi bencana dalam mengurangi kabut asap, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi bencana telah dijalankan secara optimal oleh BPBD Provinsi Riau, dapat dilihat dari berbagai faktor yang telah dilaksanakan terkait dengan komunikasi bencana. Keempat faktor tersebut adalah *Costumer Focus*, *Leadership commitment*, *Situational awareness*, dan *Media partnership*. Walaupun keempat faktor tersebut juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang terjadi dilapangan, seperti *human error*, eksplorasi lahan oleh perusahaan dan kondisi cuaca. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi *stakeholder* atau pemerintah terkait dengan penanganan kabut asap. Dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan komunikasi bencana di Provinsi Riau, sehingga permasalahan kabut asap yang setiap tahun terjadi dapat ditangani dengan maksimal.

Kata Kunci: Komunikasi Bencana, Kabut Asap, Provinsi Riau.

Abstract

This study aims to identify the optimization of disaster communication in reducing haze, using a qualitative descriptive approach. The results show that the implementation of disaster communication has been carried out optimally by BPBD of Riau Province, it can be seen from various factors that have been implemented related to disaster communication. These four factors are Costumer Focus, Leadership commitment, Situational awareness, and Media partnership. Although the four factors are also influenced by other things that occur in the field, such as human error, land exploration by companies and weather conditions. This research can be a reference for stakeholders or the government related to the handling of haze. Further in-depth research is needed related to disaster communication in Riau Province, so that the haze problem that occurs every year can be handled optimally

Keywords: Disaster Communication, Haze, Riau Province

How to Cite: Rohayati & Alhidayatillah, N (2020). Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau, *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 6(1): 1-10

PENDAHULUAN

Provinsi Riau menjadi salah satu daerah di Indonesia yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi penyebab utama bencana kabut asap. Pada tahun 2019 bencana kabut asap kembali terjadi di Provinsi Riau, sepanjang bulan Januari hingga Juni luas lahan yang terbakar mencapai 584.72 hektar.

Hal ini sesuai dengan keterangan kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Riau, Edwar Sanger total luas lahan yang terbakar tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Dumai, Meranti, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak dan Indra Giri Hilir.

Datangnya musim kemarau serta pembukaan lahan pertanian baru dengan cara dibakar yang marak terjadi di Provinsi Riau juga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun. Pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, diperlukan suatu upaya komunikasi yang efektif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga alam khususnya hutan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Riau yang mayoritas lahan gambut sehingga menyulitkan pemadaman api dikarenakan kebakaran terjadi berada di bawah tanah. Komunikasi bencana memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan penganggulangan bencana, baik itu oleh pihak pemerintah seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BPBD, pihak perusahaan ataupun masyarakat. Masyarakat juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana.

Masyarakat yang sudah pernah mengalami bencana pola komunikasinya akan berubah karena mereka sadar mengapa komunikasi penting untuk dilakukan. Seperti yang dikatakan Damayanti (2010), masyarakat yang pernah terkena bencana akan sangat responsif terhadap informasi yang diberikan. Sebagai korban, masyarakat akan sangat menanti setiap informasi sebagai tolak ukur perbuatan yang akan mereka lakukan.

Dalam konteks penanggulangan bencana Nyoman (2002) mengatakan komunikasi menjadi jembatan penghubungan untuk menyalurkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bencana. Informasi adalah simbol-simbol yang dipertukarkan dalam komunikasi antar manusia, yaitu alat atau saluran komunikasi mengirim simbol-simbol itu dari satu titik ke titik lain ditempat lainnya. McCreadie, M., & Rice, R, (1999) mengatakan informasi merupakan bagian dari komunikasi yang maknanya berada pada komunikator. Informasi juga sebagai sumber daya atau komoditas atau informasi yang ditransmisikan dalam pesan dari pengirim ke penerima. Penerima menafsirkan pesan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim, nilai dapat ditambahkan untuk untuk disebarluaskan dan diinformasikan.

Jenis informasi beragam dan memiliki manfaat yang berbeda bagi setiap penerima, Sutanta (2003) menjelaskan bahwa informasi bermanfaat untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian pemakai, mengurangi resiko kegagalan, memberikan standar, aturan-aturan, ukuran, dan putusan untuk menentukan capaian, sasaran dan tujuan. Komunikasi bencana menjadi salah satu

strategi untuk memberikan informasi yang akurat terkait dengan kejadian bencana yang terjadi (Rudianto, 2015; Lubis, Sabarina & Masril, 2019). Komunikasi bencana diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada semua lini tentang pencegahan dan penanganan bencana. Berawal dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Analisis Fungsi Komunikasi Bencana Dalam Mengurangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap bagaimana fungsi komunikasi bencana dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, serta mengungkap bentuk-bentuk komunikasi bencana yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat digunakan atau diukur melalui metode kuantitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada kualitas data bukan banyaknya data (Rachmat, 2006).

Subyek dalam penelitian ini adalah BPBD Provinsi Riau. Objek dalam penelitian ini adalah analisis fungsi komunikasi bencana dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah kepala BPBD Provinsi Riau

sebagai *key informan* yaitu Edwar Sanger. Selanjutnya, infoman juga diambil dari beberapa staf BPBD, dan dari masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan yang dilakukan oleh BPBD.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data langsung di lapangan yaitu tanggapan dari *key informan* Kepala BPBD Provinsi Riau, Edwar Sanger beserta staf BPBD Provinsi Riau. Selanjutnya sumber data juga diperoleh dari masyarakat yang terlibat langsung dalam program dan kegiatan yang dicanangkan oleh BPBD. Kemudian ditambah dengan buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif Miles dan Huberman (Fattilima, 2005) dengan cara menunjukkan adanya sifat interaktif antara kolektif data, selanjutnya direduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terlaksananya empat tahap dalam komunikasi bencana yaitu *Costumer Focus*, *Leadership commitment*, *Situational awareness*, dan *Media partnership*, membuktikan keberhasilan BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Jumlah kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Seperti yang pemberitaan yang telah di rilis oleh bisnis.tempo.co dan diolah dari berbagai sumber bahwa pada tahun 2015 jumlah lahan yang terbakar mencapai 584.72 ha, sementara itu pada tahun 2019 lahan yang terbakar menurun menjadi 49.266 ha per Agustus 2019.

Upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau salah satunya melalui proses komunikasi. Fungsi komunikasi bencana dalam upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan yaitu komunikasi bencana harus bisa menjadi alat penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat umum. Proses komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau harus mengacu pada empat landasan fungsi komunikasi dalam penanggulangan bencana yaitu:

Pertama, Costumer Focus yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat. Fungsi komunikasi bencana salah satunya yaitu menyampaikan pesan-pesan terkait bencana yang terjadi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami perihal bencana yang sedang terjadi. Apa saja dampak dan bahaya yang diakibatkan oleh bencana, bagaimana cara menanggulangnya, siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, dan segala hal yang terkait harus dipahami oleh semua masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mengambil sikap yang sesuai dengan posisi mereka sehingga tidak membuat kondisi semakin rumit.

Supaya masyarakat memahami dimana keberadaan mereka salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum yang dalam hal ini diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini tokoh-tokoh masyarakat dapat memahami bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi sehingga dapat menghimbau dan memberi penyadaran kepada masyarakat

disekelilingnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya bencana akibat kebakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan.

Badan Penanggulangan BPBD Provinsi Riau mengharapkan masyarakat mau memperhatikan kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Wilayah Riau sebanyak 56,1 % merupakan wilayah gambut sehingga harus diperhatikan secara seksama. Apalagi dimusim kemarau yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah gambut yang begitu luas tentu membutuhkan pengawasan ekstra sehingga semua pihak harus saling bekerjasama untuk menjaganya. Menurut Edwar Sangar kondisi bencana asap yang kerap terjadi di provinsi Riau diakibatkan oleh masyarakat yang kerap melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Tentunya kondisi ini tidak terjadi jika masyarakat sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan disekitarnya. Disinilah fungsi komunikasi bencana berlaku dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat harus menjadi penjaga dan pengawas dilingkungannya karena mereka setiap hari berada ditempat tersebut. Mereka harus memahami bahaya yang mereka timbulkan akibat dari tindakan yang mereka lakukan.

Badan BPBD Provinsi Riau mengatakan bahwa saat ini kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya telah meningkat ditandai dengan telah berkurangnya titik *hotspot* di Provinsi Riau. BPBD Provinsi Riau menyatakan bahwa masyarakat mulai paham terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga mulai menyadari perannya sebagai penjaga kelestarian

lingkungan yang ada disekitarnya sehingga mereka tidak lagi melakukan pembakaran setiap kali ingin membuka lahan pertanian atau pemukiman yang baru. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, bencana asap yang terjadi di provinsi Riau sangat parah dan menyebar hampir ke seluruh wilayah yang ada disekitarnya.

Kedua, commitment, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi. Dalam upaya pengkajian bencana yang terjadi pemerintah tidak serta merta bisa menyalahkan masyarakat karena pemerintah juga mempunyai peran penting dalam hal ini. Salah satu tugas pemerintah yaitu komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi. Pemerintah tidak hanya menjadi penonton dan mengkritisi saja tetapi pemerintahlah yang akan memberikan informasi-informasi resmi kepada masyarakat terkait bencana yang terjadi.

Pemerintah dapat memberikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara dan pemanfaatan berbagai macam media yang ada. Terkait dengan bencana asap yang terjadi di provinsi Riau yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan salah satu upaya yang bisa pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau lakukan yaitu melalui sosialisasi secara langsung. BPBD Provinsi Riau kerap memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum ataupun melalui pelatihan, seminar, yang dilakukan dengan lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah dan swasta yang ada di provinsi Riau.

Kemudian pemerintahan desa sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus mampu membuat komunikasi yang menarik melalui media dan aplikasi-aplikasi yang ada. Dengan harapan masyarakat akan sadar guna dan manfaat informasi ketika adanya sebuah bencana (Abadi, 2012) Selain sosialisai langsung BPBD Provinsi Riau juga memanfaatkan media komunikasi untuk menunjang proses komunikasi bencana melalui media cetak, visual, audio visual, dan berbagai jenis media komunikasi yang bisa dimanfaatkan.

Badan Penanggulangan BPBD Provinsi Riau juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang bisa bekerja sama dalam proses penyampaian komunikasi bencana seperti Pramuka Siaga Bencana, Pemuda Tangguh Bencana, Mapala Peduli Bencana, Baznas Bencana, dan berbagai komunitas yang lainnya (Kamaruzzaman:2018). BPBD Provinsi Riau selaku pemerintah harus aktif menjalin kerja sama dengan semua lini (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang ada supaya fungsi komunikasi bencana bisa sampai dan dapat dipahami oleh semua orang dari semua kalangan. Tidak ada unsur tebang pilih dalam memberikan informasi kepada masyarakat, semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Masyarakat juga diharapkan mampu memahami bahaya dari dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga mau menjaga lingkungan disekitarnya. BPBD Provinsi Riau memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat ketika bencana kebakaran telah dan belum terjadi. Jika kebakaran telah terjadi masyarakat

diberikan pengetahuan bagaimana cara memberikan informasi kepada pemerintah, bekerjasama dengan tim yang ada di lokasi kejadian, memahami bahaya akibat bencana yang terjadi, dan bagaimana cara menanggulangnya. Sedangkan jika bencana belum terjadi maka sosialisasi diberikan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengidentifikasi jika ada potensi atau indikasi akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di sekitar mereka.

Ketiga, Situational awareness, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi tidak sembarangan berdasarkan pemikiran dan perasaan saja karena informasi yang disampaikan harus akurat dan sumbernya jelas. Sebagaimana salah satu fungsi komunikasi bencana yaitu memberikan pemahaman terkait informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bencana yang terjadi. Jika pemerintah tidak akurat dalam menyampaikan informasi maka akan terjadi kesimpangsiuran berita karena tidak valid datanya. Oleh karena itu, dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau BPBD Provinsi Riau harus bersinergi dengan segala komponen yang kompeten dibidangnya masing-masing agar mewakili segala unsur yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana yang terjadi.

Keempat, Media partnership, kerjasama dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada public. Saat ini aktivitas manusia sangat bergantung kepada media-media informasi. Hampir

disetiap aktivitasnya menggunakan alat-alat atau media informasi yang menyuguhkan informasi-informasi *terupdate*. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman telah bertransformasi sedemikian rupa sehingga apapun bentuk informasi yang dibutuhkan sudah bisa diketahui dan dilakukan dalam hitungan detik saja.

Dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau BPBD Provinsi Riau tidak bisa bekerja sendirian tetapi harus bekerjasama dengan media-media informasi baik skala lokal, nasional, media cetak, elektronik, atau apapun bentuknya karena mereka nanti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan menyebarkannya kepada publik.

Penggunaan media seperti televisi, surat kabar, radio, sosial media dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap informasi menuntut pemerintah untuk sigap dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Jika pemerintah tidak aktif dalam memberikan informasi dikhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan pribadi. Sudah wajib bagi pemerintah harus menjalin kerjasama dengan media-media komunikasi untuk menjamin keaslian dan kualitas berita atau informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat luas.

Fungsi komunikasi bencana sebagai jalan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi harus dipenuhi karena terkait dengan kondisi mental dan emosional masyarakat ketika terjadi sebuah bencana. Kegelisahan, rasa penasaran, ketakutan yang dialami jika

tidak mendapatkan informasi yang benar akan menyebabkan kesalahan yang fatal berupa kemarahan, kekesalan dan bisa dilampiaskan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak terduga, seperti cacian, kekerasan, cemoohan, dan sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan fungsi komunikasi bencana dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau BPBD Provinsi Riau melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu: Kegiatan jangka pendek dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara aktivitas langsung berupa pemadam api dilokasi kebakaran sehingga tidak meluas ketempat lain. Kegiatan jangka pendek ini biasanya langsung dilakukan oleh satgas lapangan. Sedangkan masyarakat berfungsi sebagai pengawas atau pemberi informasi awal kondisi yang ada dilapangan. Pernyataan Bapak Edwar Sanger senada dengan implentasi renstra terkait lima fungsi BPBD yaitu melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana, Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana, yang meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana yang vital.

Kegiatan jangka menengah BPBD Provinsi Riau dilakukan dengan cara membentuk Desa Tangguh Bencana di

daerah atau desa yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tujuan kegiatan jangka menengah ini adalah sebagai upaya pengendalian bencana yang bisa terjadi kapan saja. Masyarakat diperkaya dengan informasi-informasi terkait dengan bencana dan segala kemungkinan yang bisa terjadi sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan jangka panjang BPBD Provinsi Riau melakukan pengurangan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memberikan pengajaran kepada mahasiswa yang ada di Provinsi Riau. Mahasiswa dijadikan mitra sebagai agen perantara antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa bisa melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan misalnya ketika sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan di berbagai desa yang tersebar di Provinsi Riau.

Ketiga usaha diatas merupakan implentasi BPBD dalam menanggulangi bencana yang ada di provinsi Riau. Dalam Renstra sudah dicantumkan salah satu hal yang perlu dilakukan yaitu: memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan berbagai permasalahan penanggulangan bencana yang ada secara mandiri yang berbasis realita dan *relative* sederhana, sehingga dapat dilakukan masyarakat pada tingkat desa. Selanjutnya, dunia usaha/lembaga

usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Misalnya, melalui pembuatan *Business Continuity Plan*. BCP merupakan strategi yang dilakukan untuk menekan resiko bencana yang mungkin akan timbul dimasa mendatang. Dengan adanya BPC maka diharapkan perusahaan/instansi pemerintah dapat meminimalisir gagalnya kemampuan operasional yang diakibatkan oleh bencana. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar lingkungan usaha ataupun di dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana.

Demikian pula melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga usaha dapat menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana.

Ketiga bentuk komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau. Misalnya, PRB dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menyikapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi.

BPBD Provinsi Riau menganggap bahwa komunikasi bencana yang dilaksanakan melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang telah dibentuk

di Desa Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan, penyebaran luas maklumat Gubernur Riau tentang kebakaran hutan dan lahan, informasi melalui radio, televisi, koran, majalah, selebaran, serta pemasangan baliho kebakaran hutan dan lahan yang dipasang di 12 Kabupaten/Kota telah efektif dalam mengurangi terjadi kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau.

Pernyataan ini didasarkan kepada kondisi masyarakat yang dianggap sudah memahami program-program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau. Kepedulian masyarakat dianggap sudah semakin meningkat karena dijadikan sebagai bagian penting dalam memelihara lingkungan. Masyarakat dianggap sebagai bagian yang sangat berpengaruh dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau. Adapun Sebaliknya, masyarakat yang belum memahami hal tersebut akan terus dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait.

Dengan komunikasi terstruktur dan terkoordinir, BPBD Riau bisa menggerakkan *stackholder* terkait untuk ikut serta menanggulangi bencana asap di Riau. Misalnya koordinasi dengan Bupati atau Walikota mengenai pemanfaatan seluruh infrastruktur yang bisa dipergunakan serta koordinasi tentang kondisi terkini terkait bencana asap, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengenai pengadaan pos kesehatan dan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau mengenai pengadaan bantuan sosial berupa makanan dan minuman serta koordinasi dengan Dinas PU Riau mengenai pembuatan embung dan pembersihan kanalkanal yang tersumbat (Firman, 2006). Berdasarkan data BPBD

Provinsi Riau kondisi hotspot yang berada di Provinsi Riau terus mengalami penurunan. Kondisi ini bisa dilihat melalui diagram di bawah ini:

Gambar 1: Data Hotspot Pusdatin BPBD Riau 2014 – 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa *hotspot* dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebanyak 11.272 titik *hotspot* mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 3400 titik *hotspot*. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebanyak 1397 titik *hotspot* dan hingga bulan Juli 2017 sementara sebanyak 190 titik *hotspot*.

Berdasarkan data diatas terlihat jelas pengurangan titik *hospot* di Provinsi Riau berkat kerja keras dari semua unsur yang terlibat dalam usaha ini. Terkait dengan telah tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau BPBD Provinsi Riau berharap untuk tahun-tahun yang akan datang tidak akan terjadi lagi kasus-kasur kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dampak kebakaran hutan dan lahan seperti matinya hewan dan tumbuhan yang ada didalamnya, penyakit yang diakibatkan oleh asap, dan

sebagainya tidak bisa hilang dalam waktu yang singkat sehingga diupayakan agar bencana ini tidak akan terjadi lagi.

Kegiatan evaluasi akan selalu BPBD Provinsi Riau lakukan untuk mengontrol kondisi yang ada dilapangan. Seandainya ada kejadian yang terjadi secara mendadak atau diluar dugaan dapat ditanggulangi secepat mungkin.

Jika bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi maka BPBD Provinsi Riau akan terus berupaya melakukan komunikasi bencana seefektif mungkin, ditambah dengan terobosan-terobosan baru agar penanggulangan bencana akibat kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan cepat, tegas dan tanggap. Jika untuk masa yang akan datang komunikasi bencana dianggap sudah tidak relevan lagi maka BPBD Provinsi Riau akan mencari strategi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi selagi masih mampuni akan terus digunakan (Tengku:2018). Mengingat fungsi komunikasi bencana yang sangat sesuai dengan upaya penanggulangan bencana yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

SIMPULAN

Berdasarkan gambaran dan uraian situasi dan kondisi yang peneliti temukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, terkait fungsi komunikasi bencana dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hasilnya sudah maksimal. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui fungsi komunikasi bencana dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah memenuhi empat syarat implementasi komunikasi bencana yaitu *costumer focus*, *leadership*

commitment, situational awareness, dan media partnership. Kemudian dilihat berdasarkan bentuk-bentuk komunikasi bencana oleh BPBD Provinsi Riau dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu: kegiatan jangka pendek, kegiatan jangka menengah, dan kegiatan jangka panjang oleh BPBD Provinsi Riau. Ketiga bentuk kegiatan ini merupakan implementasi komunikasi bencana yang telah dilaksanakan secara penuh oleh BPBD Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Devito, J. (1997) Komunikasi antar manusia, Jakarta: Professional Books.
- Abadi, T. W., & Mahendrawati, I. K. (2012). Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan (Studi Kasus di Stren Kali Jagir Wonokromo-Surabaya). Scriptura, 3(2), 112-128.
- Fajar, J. (2011) Manajemen Penyiaran Berita Bencana, bagian dari buku Komunikasi Bencana, Yogyakarta: Buku Litera kerjasama dengan ASPIKOM dan Perhumas.
- Firman, (2016), Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bencana Asap Di Riau, JOM FISIP 3 (2), 1-15.
- Haddow and Haddow, (2008) 2Disaster Communication in a Changing Media World, Burlington USA: Butterworth, Heinemann.
- Indriani, C. (2017) 1.052 hektar lahan dan hutan di riau ludes terbakar. Diunduh di <http://regional.kompas.com/read/2017/09/18/23030061/1.052-hektar-lahan-dan-hutan-di-riau-ludes-terbakar>, pada tanggal 18 September 2017
- Istiyanto, S.B. (2015). Penggunaan Media Komunikasi Tradisional Sebagai Upaya Pengurangan Jatuhnya Korban Akibat Bencana Alam. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 25-38.
- Kriyantono, R. (2006) Teknik praktis riset komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2014). Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 Pada Saat Tanggap Darurat. Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK), 10(2).
- Lubis. F.W. Sabarina, Y. & Masril. M. (2019). Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Ditinjau dari Aspek Komunikasi dan Koordinasi. Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study. 5 (1): 1-22
- McCreadie, M., & Rice, R, (1999) Trends in analyzing access to infomation. Information processing and management, 35(1), 45-76
- Miswandi (2009), Problematika Penentuan Waktu Pengungsian, BPPTKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi.
- Pattilima, H, (2005), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Pendit, N.S., (2002) Ilmu pariwisata sebuah pengantar edisi refisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rochajat, H, et al, (2011) Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ruben, B.D., Stewart, L.P. (2013), Komunikasi dan perilaku manusia (Edisi kelima). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudianto, (2015), Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana, Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 1 (1): 51-61
- Sutanta, E, (2003), Sitem Informasi Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu.